



Pemerintah Buru Aktor 'Desa Hantu'

JAKARTA, SP - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah menginvestigasi kebenaran a d a n y a

desa tak berpenduduk alias fiktif yang mendapatkan aliran uang dari program dana desa.

Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Askolani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji data di Ditjen Perimbangan Keuangan yang menjadi pengawas program dana desa

• Baca Halaman 7

Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri



Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa).



Joko Widodo
Presiden RI

Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga fiktif tertangkap.



Hal 1 ■ **pemerintah buru**

"Lagi diminta ibu *review* ke dirjen perimbangan keuangan," kata Askolani, Jakarta, Kamis (7/11).

Hasil kajian tersebut, kata Askolani akan menjadi pegangan Kementerian Keuangan dalam menentukan kebijakan program dana desa ke depannya.

"Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," ungkap dia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tantangan dalam penyaluran dana desa pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, karena ada dana desa, mulai bermunculan desa-desa baru. Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun men-

gatakan bakal melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Adapun per September 2019, Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,9 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun.

Angka penyerapan ini menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 63,2 persen atau Rp 37,9 triliun.

Sri Mulyani pun mengamini kinerja dana desa hingga saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Padahal setiap tahunnya, besaran anggaran untuk dana desa terus meningkat.

"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.

Buru Pelaku

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengejar dan menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif untuk meraup kucuran dana desa. Presiden juga mengatakan kejadian munculnya desa fiktif ini mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas.

Kabar adanya desa 'hantu' ini awalnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri menerima informasi adanya desa tidak memiliki penduduk, namun memanfaatkan transfer uang rutin dari pemerintah.

"Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga

fiktif tertangkap," kata Jokowi usai Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11)

Jokowi mengatakan mengatur lebih dari 74.800 desa dari Sabang hingga Merauke tak mudah. Namun ia akan menelusuri informasi desa fiktif agar pelaku yang berani bermain dapat tertangkap.

"Desa siluman itu misalnya dipakai plang-nya saja tapi desanya *enggak* ada," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengandeng Polri untuk menyelidiki dugaan desa fiktif untuk memperoleh dana desa. Tito mengatakan, polisi telah menerjunkan tim mengusut desa fiktif tersebut.

Menurut dia, ditemukan empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara.

"Sudah sudah bergerak, tim kita sudah bergerak ke sana bersama pemda provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam sudah tahu juga ini," kata Tito.

Dia mengatakan, empat desa fiktif ini tidak mempunyai penduduk, tapi mendapat anggaran dari pemerintah.

"Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana, mekanismenya selama ini kita serahkan provinsi untuk cek, kita ga memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus cek 70 ribu desa se-Indonesia," ucap Tito.

Oleh karena itu, dia langsung menjalin kerja sama dengan Polda Sultra untuk mengecek kebenarannya. Ia

menegaskan, sanksi hukum menanti penertimanya.

"Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai padahal enggak ada desanya tinggal proses hukum tindak pidana korupsi, kalau ada pemalsuan KTP fiktif maka pemalsuan KTP kenakan, pidana pemalsuan," ucap Tito.

Tito meminta Kapolda menindak tegas para pelakunya. "Kalau memang fiktif, tindak aja. Baru perbaiki sistemnya," tutup dia soal dugaan korupsi dana desa.

Pecat Pejabat Terlibat

O m b u d s m a n RI mengimbau pemerintah pusat untuk mencopot pejabat atau kepala daerah yang terbukti mengorupsi dana desa lewat pembentukan kampung fiktif.

"Kalau pemerintah sudah tahu, langsung saja copot pejabatnya karena sudah menyalahi beberapa ketentuan," ujar anggota Ombudsman RI Laode Ida.

Laode menuturkan pejabat yang mengorupsi dana desa telah melanggar janji jabatan. Lebih lanjut, Laode berkata pejabat korup tidak boleh dibiarkan terus menjabat. Selain merugikan rakyat, pejabat korup tidak memiliki moral.

"Tidak ada alasan tidak diberi sanksi oleh atasan, langsung pecat saja," ujar Laode.

"Kalau bupati yang mengurus itu, pemerintah harus mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan bupatinya atau siapa pun," sambung pria yang juga pernah duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut. (dti/bob)

